

Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)

Halens Ryanlie Ole

(Email : ryanlie.ole@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study was to obtain how to implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) on the quality of financial reporting in the Agency of Revenue, Finance and Asset Management (DPPKAD) of Southeast Minahasa Regency.

This research method is qualitative research with interviews and document study taken with cross-sectional approach. Interviews performed to Southeast Minahasa District Secretary about SIMDA implementation and the survey of preparation of financial statements in DPPKAD to five respondents and in SKPD to 30 treasurers.

The results reveal that the use of the SIMDA process in accordance with the mandate Minister Regulation No. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. The SKPD participation rate is still low, but participation by type of user has been pretty good. The data show that opinion of BPK is directly proportional to the increase in the use of SIMDA in the each of SKPD. Factors found to influence besides SIMDA to the quality of the financial statements is the human factor, the inspectorate, head of Regional leadership, feedback on BPK recommendations, and consistency in the application of SIMDA. Evaluations on human factors concluded that the level of human resources were classified based on aspects SIMDA educational background and the number of Bimtek. Inspectorate human resources is very good in quality but less in number in serving on SKPD. Local leaders considered quite good, the feedback of the BPK recommendation is quite good, and consistency in the application of SIMDA also been good.

Keywords: Implementation of SIMDA, the quality of financial reporting, SKPD, financial management.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi

pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau asset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan asset daerah yang professional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stake holder lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan asset daerah. Permasalahan dalam pengelolaan asset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, namun juga dipengaruhi karena banyaknya asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut seperti yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal penatausahaan asset daerah, masih banyak asset atau barang milik daerah yang belum masuk dalam data inventarisasi barang milik daerah. Permasalahan tersebut muncul akibat sistem pengelolaan asset yang masih bersifat manual. (Rizki, Luhur Nurmala. 2012)

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan manajemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basisi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam rangka untuk memahami permasalahan yang terkait dengan masalah Sistem informasi di daerah di kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen manajemen keuangan bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini dengan mengambil judul, ***“Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen***

Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD : Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai implementasi sistem manajemen informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi SKPD di lingkungan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Cresswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau suatu kasus. (Raco. J.R. 2010)

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Oktober tahun 2014.

1.5.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat dan para staf di lingkungan Dinas DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat 3 adalah Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) dan Staf Bidang Pelaporan Keuangan sebagai responden penelitian.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data berupa informasi langsung yang didapat dari subjek/responden penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang sifatnya dokumentasi. Data primer didapatkan dari Pejabat dan para staf pada Dinas PPKAD yang ditentukan sebagai responden penelitian. Data sekunder berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 – 2013.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner.

1.5.6 Metode Analisis

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) menarik kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1994: 10). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan pemilahan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Secara umum, Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013).

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

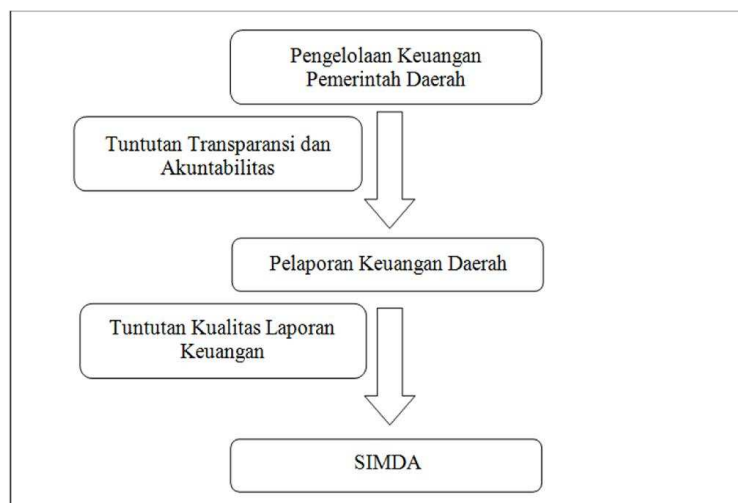
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar.

Indra Bastian (2009: 94-96) menyatakan bahwa kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) substansi mengungguli bentuk, (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan. Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gb. 2 sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: data olahan

Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunannya, pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas, dan hal itu dimanifestasikan dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah. Pelaporan keuangan daerah harus memenuhi syarat-syarat kualitas laporan keuangan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, penggunaan SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kualitas isi laporan keuangan daerah tersebut.

3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km² atau 73.062 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha. Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan yang berjarak 80 km dari Manado. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara : 1240 30'24" – 1240 56'24" BT, 10 08'19" – 00 50'46" LU.

3.2 Gambaran Umum Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Kabupaten Minahasa Tenggara

Dalam penerapan *IT Governance* tidak semua Sistem Informasi berhubungan dengan Laporan Keuangan artinya menghasilkan Data sumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini tergambar pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 1 Sistem Informasi Teknologi yang Diterapkan Berdasarkan Produk Data pada Laporan Keuangan

NO	NAMA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI	NAMA SISTEM	PRODUK DATA PADA LAPORAN KEUANGAN
1	Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG	-
2	Sistem Informasi Gaji	SIMDA GAJI	Data Gaji Pegawai pada Belanja Pegawai
3	Sistem Informasi Aset	SIMDA ASET	Data Barang Milik Daerah pada Belanja Modal dan Aset Tetap
4	Sistem Informasi Keuangan	SIMDA KEUANGAN	LRA, NERACA, LAK, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan APBD dan APBDP
5	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	-

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Untuk menjamin kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan untuk tertibnya pengelolaan administrasi serta menerapkan secara optimal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Bupati nomor 89 Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014 tentang Batasan

dan Otoritas Identitas Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

4. ANALISIS DAN EVALUASI

4.1 Analisis

4.1.1 Gambaran Umum Tingkat Implementasi SIMDA

1.Sasaran dan Tujuan Pelaksanaan SIMDA

Sasaran pelaksanaan SIMDA pada SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah agar setiap SKPD dapat melaksanakan SIMDA sebaik-baiknya. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai adalah agar SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Tingkat pemakaian kebijakan SIMDA

Pemerintah daerah Minahasa Tenggara mulai melaksanakan SIMDA pada tahun 2007, saat kabupaten ini berdiri. Lewat asistensi dari BPKP, pemerintah daerah mulai melaksanakan aplikasi SIMDA. Idealnya, SIMDA dijalankan mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga laporan keuangan. Walau begitu, hingga tahun 2008, SIMDA baru efektif pada level penganggaran. Level penganggaran memerlukan masukan berupa pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Satu tahun kemudian, selain penganggaran, penatausahaan juga telah menerapkan SIMDA. Penatausahaan memerlukan masukan yang lebih banyak yaitu SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Langkah ini merupakan langkah yang baik karena setahun kemudian, keluar PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru, menggantikan PP No 24 tahun 2005. Dalam SAP baru ini, pemerintah pusat maupun daerah harus mengganti CTR menjadi akuntansi akrual penuh selambat-lambatnya tahun 2015. Tahun 2014, semua SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan SIMDA secara efektif hingga pada level laporan keuangan.

3. Ketersediaan Sarana SIMDA

Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA diinstalasikan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah instalasi, komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di Dinas PPKAD. PPKAD menjadi lokasi server karena dinas ini yang langsung menangani sistem informasi keuangan daerah tersebut. SKPD kemudian datang ke dinas PPKAD untuk mendapatkan nama pengguna dan kata kunci untuk masuk ke dalam server. Karena sarana yang diperlukan tergolong sederhana, maka sarana-sarana ini sepenuhnya tersedia pada SKPD-SKPD.

4. Proses-Proses dalam SIMDA

Semua proses yang terjadi di dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan lewat SIMDA merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Proses Penyusunan RKA, b. Proses Penyusunan DPA, c. Proses Pembuatan Anggaran Kas, d. Proses Pergeseran Anggaran, e. Proses Perubahan Anggaran.

4.1.2 Kemampuan Kerja SDM SIMDA

1. Kualitas dan Kuantitas SDM untuk Pelaksanaan SIMDA

Pengguna SIMDA terdiri dari beberapa level mulai dari operator berupa 44 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), 45 bendahara pengeluaran, dan sembilan bendahara pendapatan, serta lima pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan satu Auditor dari Inspektorat, supervisor dari seorang pejabat pengelola keuangan daerah, administrator dari dua orang pejabat pengelola keuangan daerah. Total SDM yang terlibat sebagai pengguna SIMDA adalah sebanyak 107 pengguna. Berdasarkan sampel dari 30 orang bendahara, ditemukan bahwa mayoritas pendidikan pegawai adalah S1. Terdapat pula bendahara dengan latar magister dan ini berada pada SKPD inspektorat. Sementara itu, pada SKPD BLHKP dan BKDD memiliki bendahara lulusan diploma, dan pada KAP, DESDM, dan KPP memiliki bendahara lulusan SMK. Hanya ada satu berlatar pendidikan TI yaitu bendahara Dukcapil yang merupakan sarjana komputer. Begitu pula, hanya ada tiga bendahara dengan latar akuntansi yaitu bendahara DPPKAD, Sekda, dan PU. Mayoritas merupakan sarjana di bidang manajemen.

Dengan profil SDM seperti ini, narasumber berargumen bahwa pada dasarnya pendidikan bukanlah masalah. Karena SIMDA dirancang dengan interface yang baik, asalkan individu mau belajar maka ia dapat memahami dan menggunakan SIMDA. Hal ini terlebih lagi adanya dilema antara dasar pendidikan TI dengan dasar pendidikan akuntansi. Seorang pengguna dengan latar TI mungkin dapat sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara itu, seorang pengguna dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan TI. Karenanya, latar pendidikan tidak terlalu diutamakan tetapi aspek yang lebih diutamakan adalah aspek diklat.

2. Tingkat Pengalaman Pegawai dalam Pelaksanaan SIMDA

Pengalaman pegawai dalam pelaksanaan SIMDA tergantung dari usia kerja mereka pada tugas SIMDA. Karena Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten yang baru terbentuk enam tahun lalu, maka paling lama pengalaman pegawai dalam pelaksanaan SIMDA adalah enam tahun. Waktu ini menurut narasumber sudah dapat digolongkan sedang untuk memberikan pengalaman bagi pegawai. Pengalaman yang terlalu baik justru tidak diharapkan karena dapat memunculkan bahaya berupa peretasan atas SIMDA. Pengalaman tinggi hanya diharapkan dari pengguna yang bertugas sebagai administrator saja, yang terdiri dari dua orang yaitu kepala bidang akuntansi dan kepala bidang anggaran dari dinas PPKAD. Sementara itu, pada tingkat operator, pengalaman yang diperlukan hanya dalam bentuk kesesuaian dengan SOP. Hal ini karena ruang gerak operator terbatas dan hanya dapat mengakses SPT, SPM, dan lainnya pada tingkat SKPD masing-masing. Hanya pengguna di dinas PPKAD yang dapat mengakses untuk tingkat SKPAD.

3. Program Pengembangan SDM lewat Diklat (Bimtek) SIMDA

Karena tidak bertopang pada latar pendidikan formal, maka kompetensi dari SDM SIMDA harus bertopang pada kinerja diklat. Hal pertama yang diajarkan adalah bagaimana menggunakan SIMDA. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis. Pelatihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan BPKP sebagai pemegang hak cipta dari SIMDA. Pelatihan dilakukan pada seluruh pengguna SIMDA, termasuk

PPK. PPK dilibatkan karena ia diperlukan untuk melakukan pengesahan mengenai kesesuaian data yang dimasukkan bendahara dalam SIMDA. Diklat dilakukan setiap tahun sebanyak dua hingga tiga kali.

Data sampel bendahara sebanyak 30 orang menunjukkan bahwa mayoritas (14 orang) jumlah Bimtek Simda yang telah diikuti adalah sebanyak 2 kali bimtek. Terdapat dua orang bendahara yang belum pernah mengikuti bimtek yaitu dari Sekretariat DPRD dan Kesbangpol. Sementara itu, satu bendahara, yaitu dari Sekretariat Korpri, telah mengikuti bimtek SIMDA hingga enam kali.

4.1.3 Tingkat Partisipasi dalam Implementasi SIMDA

1. Tingkat Partisipasi SKPD

Proses umpan balik dalam penggunaan SIMDA ditemukan hanya beberapa saja SKPD yang aktif. Menurut laporan narasumber, hanya ada tiga SKPD aktif yaitu dinas PPKAD, Sekretaris Daerah, dan Dinas Kehutanan. Tiga SKPD ini aktif dalam memberikan masukan jika ada program yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai contoh, masukan pernah datang dari pengendalian dana kas daerah. Dalam SIMDA ia hanya berupa jurnal, sementara pengguna memerlukan keluaran dalam bentuk SPM.

2. Tingkat Partisipasi SDM

Dilihat dari SDM, terdapat tingkat perbedaan partisipasi antara bendahara dengan PPK. PPK dipandang kurang berpartisipasi karena telah berumur. Terdapat sebuah celah generasi yang membuat mereka tidak terlalu aktif dalam menggunakan teknologi komputer. Mereka berusia antara 40 hingga 50 tahunan yang berarti lahir pada era manual. Sementara itu, para bendahara berusia rata-rata lebih muda. Rata-rata baru berusia 31 tahun dengan usia termuda 23 tahun dan tertua 40 tahun. Mereka lahir dan besar dalam era komputerisasi dan karenanya lebih mengerti teknologi informasi. Perbedaan ini terlihat dalam perilaku terhadap SIMDA. Para bendahara memasukkan sendiri data ke dalam SIMDA. Sementara itu, PPK hanya mewakili pada staff atau bendahara tersebut. Hanya sedikit PPK yang mau memasukkan sendiri data ke dalam SIMDA. Hal ini semestinya tidak demikian karena PPK berperan dalam memberikan pengesahan menggunakan SIMDA. Akibatnya, pengesahan ini dilakukan umumnya lewat perwakilan atau bahkan dapat disahkan sendiri oleh bendahara atas nama PPK.

4.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi SIMDA di SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan sejak akhir tahun 2008. Sebelumnya, proses pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual. Proses pembuatan laporan keuangan secara manual ini tidak langsung menghasilkan laporan keuangan maupun jurnal. Selain itu, sulit untuk melihat segera jumlah pengeluaran karena harus diperiksa ke setiap laporan SKPD. Akibatnya, hal ini membutuhkan perhitungan kembali.

4.2 Evaluasi Data

4.2.1 Hubungan antara Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Untuk melihat kemampuan SIMDA dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas secara lebih teliti, peneliti membagikan sebuah kuesioner yang mengukur kualitas laporan keuangan pada para pejabat di lingkungan Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa. Kuesioner terdiri dari 13 item yang mengukur

delapan indikator dari empat dimensi kualitas laporan keuangan. Dimensi yang digunakan mencakup enam dari 10 dimensi kualitas laporan keuangan menurut Bastian (2009:94-96) yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, penyajian jujur, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Lima dimensi ini dikelompokkan dalam empat dimensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendaftarkan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat dimensi ini dapat ditarik dari teori kualitas laporan keuangan yang dinyatakan oleh Cramer dan Thomas (1969 dalam Abubakar, 2011:4). Empat dimensi ini kemudian diadopsi oleh IASC (International Accounting Standards Committee) (Gu dan Li, 2011:202) dan ditransfer pada PP No 71 tahun 2010. Relevansi dan reliabilitas tergolong sebagai kualitas fundamental, sementara dapat dibandingkan dan dapat dipahami tergolong kualitas penguat (Agyei-Mensah, 2013:270). Penyajian jujur digolongkan sebagai dimensi keandalan sementara kelengkapan tergolong pada dimensi relevan.

a. Kelengkapan

Indikator kelengkapan dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan bahwa “Melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap”. Seluruh responden sepakat untuk setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa efek SIMDA pada kelengkapan laporan keuangan tergolong baik.

b. Manfaat Umpan Balik

Indikator manfaat umpan balik dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan bahwa “Melalui SIMDA Data yang ada dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas”. Kembali semua responden setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa efek SIMDA pada kemampuan pemantauan posisi keuangan dan penilaian kinerja dinas tergolong baik.

c. Manfaat Prediktif Pengambilan Keputusan

Indikator manfaat prediktif pengambilan keputusan dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan” dan “informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut.” Untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung proses pengambilan keputusan, empat orang menyatakan setuju, dan satu orang menyatakan sangat setuju. Sementara itu, untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung analisis laporan keuangan lebih lanjut, dua orang setuju, satu sangat setuju, dan dua tidak setuju. Jika dirata-ratakan dari kedua item, maka dapat diperoleh bahwa secara umum, responden setuju bahwa SIMDA memberikan manfaat prediktif dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA

d. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan” dan “penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan”. Untuk kemampuan SIMDA memberikan informasi saat diperlukan, tiga dari lima responden menyatakan sangat setuju sementara sisanya setuju. Sementara itu,

untuk kemampuan SIMDA dalam membantu penyusunan laporan keuangan tepat waktu sesuai deadline memberikan pendapat yang lebih negatif. Tiga justru menyatakan tidak setuju dan hanya dua yang menyatakan setuju. Walau begitu, jika dirata-ratakan, maka kemampuan SIMDA dalam memberikan ketepatan waktu tergolong baik.

Keandalan

Kehandalan, seperti halnya relevansi, merupakan dimensi kualitas laporan keuangan berbasis pasar (Cascino et al, 2010:17). Laporan keuangan harus handal sehingga dapat mencerminkan fundamental ekonomi yang berada di balik lembaga (Cascino et al, 2010:7). Selain itu, kehandalan juga diperlukan bagi stakeholder untuk meyakinkan mereka bahwa pejabat menjalankan organisasi sesuai dengan kepentingan stakeholder (Hamid dan Abdullah, 2012:144). Dengan melihat dimensi kehandalan, kita dapat meyakini bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kinerja keuangan dari SKPD. Menurut Cramer dan Thomas (dalam Abubakar, 2011:4), laporan keuangan dipandang handal jika mencerminkan realitas dan substansi transaksi dan peristiwa, bebas dari penyimpangan dan kesalahan material, lengkap, dan ketika muncul ketidakpastian, terdapat prinsip kehati-hatian yang digunakan untuk menyatakan penilaian dan prinsip ini dinyatakan secara eksplisit.

a. Penyajian Jujur

Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa “informasi yang dihasilkan dapat dipercaya”. Seluruh responden sepakat untuk setuju bahwa informasi yang dihasilkan SIMDA dapat dipercaya. Karenanya dapat disimpulkan bahwa SIMDA memberikan kemampuan laporan keuangan untuk dipercaya dengan baik.

b. Dapat Diverifikasi

Kemampuan verifikasi laporan keuangan dalam penelitian ini dilihat dari dua indikator yaitu “Data yang diinput di SIMDA melalui proses Verifikasi dahulu” dan “pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar melalui proses rekonsiliasi laporan.” Dalam hal proses verifikasi sebelum memasukkan data ke SIMDA, dua responden menyatakan sangat setuju sementara tiga lainnya setuju. Sementara itu, untuk proses rekonsiliasi laporan untuk pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan, hanya satu yang menyatakan sangat setuju. Empat lainnya menyatakan setuju. Hal ini bermakna bahwa secara umum, indikator dapat diverifikasi tergolong baik.

Dapat dibandingkan

Indikator dapat dibandingkan dalam penelitian ini didekati oleh dua item yaitu “Laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIMDA dapat dilihat untuk 3-5 tahun terakhir” dan “Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilihat dan dibandingkan pencapaian masing-masing per SKPD”. Untuk kemampuan SIMDA memberikan laporan keuangan dalam tiga hingga lima tahun terakhir, empat responden menyatakan tidak setuju dan hanya satu yang menyatakan setuju. Sementara itu, untuk kemampuan melihat dan membandingkan pencapaian masing-masing SKPD berdasarkan laporan keuangan dari SIMDA, empat responden menyatakan setuju dan satu orang menyatakan sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelapor lain pada umumnya (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Dapat dipahami

Indikator dapat dipahami dalam penelitian ini didekati oleh dua item yaitu “Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Aplikasi SIMDA memberikan tambahan Laporan keuangan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan permintaan SKPD (agar mudah dimengerti)”. Untuk pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, seluruh responden menyatakan setuju. Sementara itu, untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA memberikan laporan keuangan yang dapat dimodifikasi, seluruh responden justru menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relatif dapat dipahami oleh pengguna dan relatif dapat dipanyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Kualitas Laporan Keuangan secara keseluruhan

Secara keseluruhan, dimensi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA dapat dilihat dari masing-masing dimensi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA cukup berguna karena memuat isi informasi berdasarkan standar kualitatif yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian diketahui bahwa proses penggunaan SIMDA telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun Tingkat partisipasi penggunaan SIMDA berdasarkan SKPD masih rendah. Ini ditunjukkan oleh hanya tiga SKPD yang aktif dalam memberikan saran perbaikan berdasarkan kuesioner yang dijalankan. Tingkat partisipasi berdasarkan jenis pengguna masih rendah. PPK masih belum berpartisipasi karena telah berusia lanjut dan kurang antusias dalam menggunakan teknologi informasi. Dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwa dengan Implementasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual.
2. Membantu Pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran) dalam mengambil keputusan sesuai data dan informasi yang ada.
3. Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dimulai dari Penganggaran, Penatausahaan sampai pada pelaporan.

Faktor-faktor yang ditemukan selain SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan adalah faktor SDM, inspektorat, kepemimpinan kepala daerah,

umpan balik terhadap rekomendasi BPK, dan konsistensi dalam penerapan SIMDA. Evaluasi pada faktor SDM menyimpulkan bahwa tingkat SDM SIMDA tergolong sedang berdasarkan aspek latar belakang pendidikan dan jumlah bimtek. Inspektorat dari segi SDM secara kualitas sangat baik namun secara kuantitas masih kurang jumlahnya dalam melayani SKPD. Kepemimpinan daerah dinilai cukup baik, umpan balik terhadap rekomendasi BPK cukup baik, dan konsistensi dalam penerapan SIMDA juga telah baik.

Saran

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. SKPD, khususnya PPK, harus lebih memperhatikan SIMDA. Hal ini penting karena PPK berperan dalam verifikasi laporan keuangan.
2. Kepala Daerah harus menambah jumlah tenaga inspektorat untuk SKPD. Hal ini perlu karena terdapat kekurangan jumlah tenaga inspektorat untuk SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. (2010). Regulation and the economics of corporate financial reporting in Nigeria. *Journal of Management and Enterprises Development*, 7 (2), 65 – 72.
- Adediran, S.A., Alade, S.O., Oshode, A.A. 2013. Reliability of Financial Reporting and Companies Attribute: The Nigerian Experience. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(16), 108-115
- Adhi, Daniel Kartika dan Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. 5(3), 93-111
- Agyei-Mensah, B. 2013. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ghana and the Quality of Financial Statement Disclosures. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(2), 269-286
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2014. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 27 Juni 2014
- Bratton, W.W. 2007. Private Standards, Public Governance: A New Look at the Financial Accounting Standards Board. *University of Pennsylvania Law School Faculty Scholarship Paper* 863
- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013. Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 87-110
- Cascino, S., Pugliese, A., Mussolino, D., Sansone, C. 2010. The Influence of Family Ownership on the Quality of Accounting Information. *Family Business Review*, 23, 246-265
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan yang Baik

- Fajonyomi, B., Kehinde, J.S. 2013. International Financial Reporting Standard: Principle, Practice and Prospect. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(20), 147-151
- Gu, X., Li, X. 2012. How to Improve the Quality of Accounting Information Based on the Corporate Governance. *M&D Forum*, 201-208
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hamid, M.A., Abdullah, A. 2012. Influence of Corporate Governance on Audit and Non-Audit Fees: Malaysian Evidence. *Journal of Business and Policy Research*, 7(3), 140-158
- Indra Bastian. 2009. *Akutansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Jogiyanto HM. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*, edisi Revisi, Yogyakarta: ANDI.
- Hardiawan, Revan, dkk., 2012. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif). *The Manager Review: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 13(1), 38-50
- Husein, Muh. Fakri dan Amin Wibowo, 2002, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi Revisi, Yogyakarta, AMP YKPN
- Kallob, D.A.M. 2013. Using the Information Qualitative Characteristics in Measuring the Quality of Financial Reporting of the Palestinian Banking Sector. Master Thesis. Islamic University of Gaza
- Machmud, Rizan. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*. 9(1), 78-85
- Marimin, Hendri Tanjung dan Haryo Prabowo. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Mohune, Cipmawati. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*. 1(1), 1-16
- Nugraha, Harmadhani Adi dan Astuti, Yuli Widi. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1), 25-33
- Padmowati, Sri. 2004. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Jepara (Hubungan Antara Variabel Pendidikan dan Latihan, Partisipasi Pegawai serta Kemampuan Kerja dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Raco, Jozef. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* Jakarta: Grasindo
- Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). *Simposium Nasional Akuntansi X : Ikatan Akuntan Indonesia*.

- Richard, B.J. 2011. Accounting Information System, Financial Decentralization, and Quality of Financial Reporting in Kampala City Council. Master Thesis. Makerere University
- Rizki, Luhur Nurmala. 2012. Penatausahaan Asset pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di kabupaten Malang. Journal of Public Administration Research (JOPAR), Vol 1, No.1, hal. 91-99
- Saraswati, Rosita Ayu. 2012. Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung. Jurnal Nominal. Vol. 1, No. 1. Halaman 1-13
- Sugiono, Arief dan Untung, Eddy. 2008. Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasmara Indonesia
- Yuliani, Safrida, dkk., 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3, No. 2. Halaman 206-220.